



PENGARUH ELEMEN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI INDONESIA

(Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar dalam Indeks Kompas 100
di Indonesia Tahun 2019-2021)

Azusma Maharani, Muchamad Syafruddin¹

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +6285740098732

ABSTRACT

This study examines several corporate governance characteristics on corporate social responsibility (CSR) disclosure in the context of emerging markets in 2019-2021. The researcher used annual report data of companies listed in the KOMPAS 100 index from 2019-2021 to investigate the relationship between board independence, board size, foreign ownership, and government ownership on the level of CSR information reporting using the ESG disclosure score. Panel data regression analysis which includes three techniques namely Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), and Random Effect Model (REM), was used to analyze the data in this study. The Random Effect Model (REM) shows the best fit among these models.

The results show that board independence, board size, and government ownership show a significant and positively correlated relationship with the company's decision to disclose CSR information. In contrast, foreign ownership is an insignificant relationship with the company's decision to disclose CSR information. This study extends the literature on CSR information, especially in developing countries where the government plays a vital role in driving economic development. Thus, the results can provide insights to policymakers to identify corporate governance characteristics that encourage CSR reporting in Indonesian listed companies. This study aims to fill a crucial gap by examining environmental disclosure in integrated reports in Indonesia. Specifically, this study will investigate corporate governance factors, board size, board independence, board gender diversity, and CSR committee, which are related to environmental disclosure levels in integrated reports in Indonesian companies.

Keywords: corporate governance, corporate social responsibility reporting, corporate social responsibility disclosure, Indonesian public companies.

PENDAHULUAN

Dalam dunia akademis dan praktik, pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan menjadi topik bahasan hangat di mana para manajer bisnis lebih memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari operasi bisnis (Amir & Serafeim, 2018; Cohen et al., 2015). Suatu perusahaan yang berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan perlu memecahkan masalah-masalah yang dapat mempengaruhi komunitas sosial sekaligus dapat memunculkan

nilai lebih bagi pemegang saham (*shareholder*) dan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya (Christensen et al., 2021). Menanggapi banyaknya akan permintaan tersebut di mana perusahaan ingin mengejar pembangunan yang berkelanjutan maka banyak perusahaan di seluruh dunia mulai mengungkapkan beberapa informasi keberlanjutan dalam laporan tahunan mereka secara rutin.

Banyak perusahaan secara sukarela menawarkan pengungkapan pelaporan untuk kegiatan lingkungan, sosial, dan praktik tata kelola perusahaan dengan maksud guna meningkatkan atau mempertahankan praktik pelaporan CSR. Seperti contoh dalam Sustainability Accounting Standards Boards (SASB) menciptakan standar pengungkapan khusus industri yang terdiri dari seluruh materi keuangan, lingkungan, sosial, dan topik mengenai tata kelola perusahaan yang dapat digunakan untuk pengarsipan SEC perusahaan. Demikian pula dengan Global Reporting Initiative (GRI) membuat standar global mengenai pelaporan keberlanjutan yang berguna bagi perusahaan untuk membantu dalam hal komunikasi dampak permasalahan yang berkelanjutan.

Pengungkapan informasi CSR berperan sangat penting bagi suatu perusahaan. Komunitas akademik memberikan sikap yang sangat responsif terhadap penelitian dalam memahami faktor penting dari penentuan keputusan pelaporan CSR perusahaan yang dilakukan secara sukarela. Penelitian terdahulu mengenai pelaporan CSR masih berfokus pada negara maju dimana memiliki pasar modal yang sudah sangat matang, kerangka hukum mengenai tanggung jawab sosial yang sudah selesai, dan yang paling penting kesadaran para pemangku kepentingan akan akuntabilitas bisnis yang tergolong sangat tinggi (Muttakin & Subramaniam, 2015). Namun disisi lain penelitian di negara berkembang masih dangat terbatas dengan pasar modal yang belum matang, peraturan mengenai tata kelola perusahaan, serta pengungkapan informasi CSR secara umum tergolong masih sangat lemah.

Tanggung jawab sosial (CSR) Perusahaan di Indonesia pada tahap pembagian keuntungan yang saat ini digunakan untuk memprioritaskan keinginan daripada kebutuhan Masyarakat. Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia ditandai banyaknya Perusahaan telah mengimplementasikan dan penerapan CSR. Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas No.40 tahun 2007 pasal 1 ayat 3 mendefinisikan CSR sebagai komitmen Perseroan terhadap keberlanjutan Pembangunan ekonomi yang berperan dalam peningkatan kualitas hidup serta menciptakan lingkungan yang memberikan manfaat bagi perseroan, komunitas sekitar, dan masyarakat. Pelaporan CSR Perusahaan disajikan sebagai sumber informasi keuangan dan non-keuangan di mana memiliki hubungan antara organisasi dengan lingkungan sekitar dan sosialnya, sehingga penyajian pelaporan CSR dapat disajikan dalam laporan tahunan maupun laporan keberlanjutan Perusahaan (R Yap & Widyaningdyah, 2009).

Implementasi CSR di Indonesia sendiri masih sangat bergantung pada kualifikasi pimpinan puncak perusahaan. Apabila pimpinan dalam suatu perusahaan memiliki kesadaran akan moral yang tinggi sangat dimungkinkan perusahaan tersebut akan melaksanakan CSR dengan baik. Namun apabila pemimpin perusahaan berorientasi pada kepuasan para pemegang saham serta pencapaian keuntungan pribadi, maka dapat dimungkinkan kebijakan CSR hanya sekedar formalitas semata. Hal tersebut membuat pelaksanaan pengungkapan CSR pada perusahaan di Indonesia berbeda-beda. Sehingga penelitian lebih lanjut mengenai faktor utama pendorong pelaporan CSR secara sukarela dalam suatu perusahaan di Indonesia sangat perlu diselidiki lebih lanjut lagi.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN HIPOTESIS PENELITIAN

Teori Legitimasi (Legitimacy Theory)

Teori legitimasi memberikan pemahaman secara tersirat bahwa manajemen puncak organisasi memiliki tanggung jawab untuk mengenai adanya kesenjangan legitimasi, melaksanakan kegiatan tanggung jawab yang dibutuhkan, serta mengungkapkan kepada para pemangku kepentingan melalui pelaporan Corporate Social Responsibility (Jizi et al., 2014). Dengan demikian, dalam teori legitimasi struktur kepemilikan saham dan komposisi dewan yang masuk dalam sistem tata kelola perusahaan dengan variabel ukuran dewan direksi, dualitas CEO, dan dewan Wanita memainkan peran yang penting dalam mengurangi adanya kesenjangan legitimasi melalui pelaporan informasi CSR dalam perusahaan.

Teori Pemangku Kepentingan (Stakeholder Theory)

Dalam sistem pelaporan CSR, Teori stakeholder mengacu pada kepentingan objek lain dalam CSR yang menuntut adanya informasi mengenai pengaruh kegiatan perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Ketika suatu perusahaan mengakui adanya kepentingan dari pemangku kepentingan yang sah, maka secara sukarela perusahaan akan melaporkan informasi lingkungan dan sosial yang diperlukan para pemangku kepentingan (Monteiro & Aibar-Guzmán, 2010). Teori ini menunjukkan bahwa karakteristik tata kelola perusahaan berupa ukuran perusahaan, independensi dewan komisaris, kepemilikan pemerintah, dan kepemilikan asing yang mempengaruhi pengungkapan CSR perusahaan.

Tata Kelola Perusahaan (Coorporate Governance)

Tata kelola perusahaan berkaitan erat dengan kepercayaan suatu perusahaan dalam menjalankan bisnis mereka dalam suatu negara (Adam et al., 2015). Penerapan tata kelola perusahaan di suatu negara juga mendorong persaingan sehat serta kondusif di dunia usaha. Oleh karena itu, penerapan tata kelola yang baik bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia berperan sangat penting dalam mendukung pertumbuhan serta stabilitas ekonomi berkelanjutan serta mendukung upaya pemerintah dalam menegakkan tata kelola perusahaan di Indonesia. Karakteristik tata kelola perusahaan di Indonesia sama seperti tata kelola perusahaan di negara-negara berkembang yaitu kepemilikan yang terkonsentrasi (Kartika I. & Indriastuti, 2014; Machek & Kubiček, 2018).

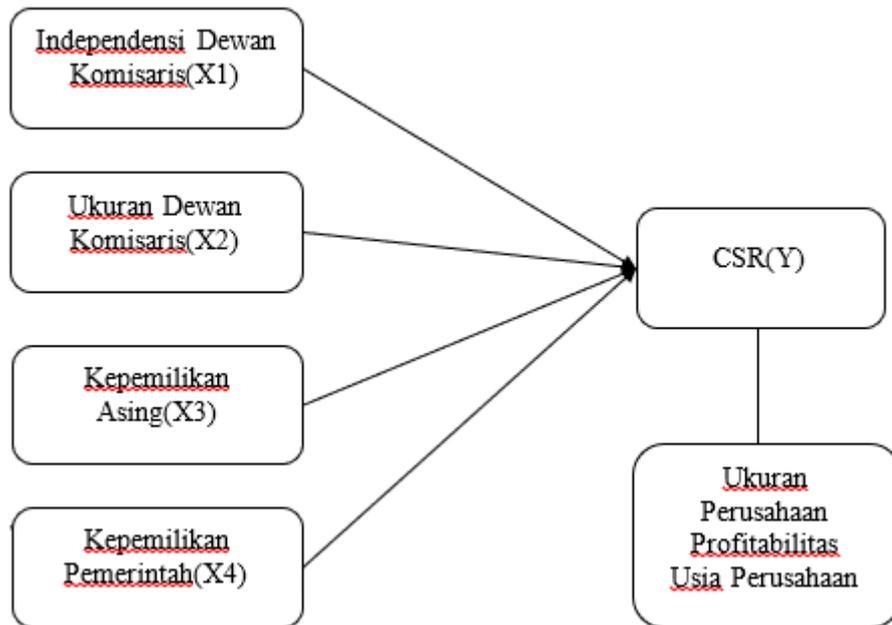
Tanggung jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responcibility)

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan didefinisikan sebagai penyedia informasi perusahaan baik keuangan maupun non-keuangan terkait interaksi perusahaan dengan lingkungan fisik dan sosial perusahaan dalam laporan tahunan atau laporan keberlanjutan yang diungkapkan secara terpisah. Konsep CSR sendiri mengalami perkembangan dari waktu ke waktu serta mulai menjadi pengungkapan yang wajib dilakukan perusahaan terhadap masyarakat yang terdiri dari beberapa dimensi yaitu dimensi lingkungan, energi, kesehatan, keselamatan kerja, tenaga kerja, keterlibatan masyarakat dan umum (Liu & Zhang, 2017; Nekhili et al., 2017; Rodriguez-Fernandez, 2016). Kerangka kerja mengenai CSR dirancang untuk memberikan nilai secara berkelanjutan bagi masyarakat luas. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan memberikan informasi bagi masyarakat terkait aktivitas perusahaan dengan masyarakat, lingkungan, karyawan, konsumen, serta pengguna energi perusahaan.

Berdasarkan hipotesis penelitian pada gambar 1, atribut Tata Kelola Perusahaan yaitu Independensi Dewan Komisaris (BOIND), Ukuran Dewan Komisaris (BOSIZE), Kepemilikan

Asing (FOROWN), dan Kepemilikan Pemerintah (GOVOWN) diharapkan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan Informasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dalam laporan Tahunan perusahaan-perusahaan di Indonesia. Kemudian terdapat juga variabel kontrol yaitu Ukuran Perusahaan (LSIZE), Profitabilitas (ROA), dan Usia Perusahaan (AGE) diharapkan berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan dalam laporan terintegrasi oleh perusahaan di Indonesia.

Gambar 1
Hipotesis Penelitian



Sumber: Penulis

Independensi Dewan Komisaris (BOIND)

Dewan Komisaris berperan penting dalam melakukan pemantauan dan pengarahan kepada manajer demi memenuhi kepentingan Stakeholder. Kehadiran anggota dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan sangat penting dan dianggap sebagai mekanisme tata kelola perusahaan yang utama (A. Khan et al., 2013a). Dalam teori pemangku kepentingan terdapat pendapat bahwa rasio independensi dewan komisaris yang tinggi pada keanggotaan dewan komisaris perusahaan menjadi elemen penting yang membantu penyelesaian masalah perusahaan dan menjaga kepentingan stakeholder lainnya seperti karyawan, pelanggan, dan komunitas (Amran et al., 2009; Chen & Roberts, 2010).

Beberapa penelitian empiris telah meneliti korelasi tata kelola perusahaan dan tingkat pengungkapan informasi dalam CSR perusahaan. Hasil menunjukkan adanya dewan komisaris independen, diukur dari persentase banyaknya keanggotaan independensi dewan komisaris dalam perusahaan berdampak positif dengan tingkat pengungkapan CSR perusahaan (Khan et al., 2013; Shu & Chiang, 2020).. Sehingga, dalam penelitian ini diusulkan hipotesis pertama yaitu

H1: Terdapat hubungan positif antara independensi dewan komisaris dan tingkat pengungkapan informasi CSR.

Ukuran Dewan Komisaris (BOSIZE)

Dilihat dari sudut pandang efisiensi dan legitimasi, dewan komisaris dalam suatu perusahaan dengan jumlah yang besar dapat memperkuat pengawasan. Selain itu secara ketat dapat memajemen perusahaan dalam mematuhi norma dan aturan yang ada dalam perusahaan (Alnabsha et al., 2018; Elamer et al., 2018). Dalam mekanisme tata kelola, semakin tinggi ukuran dewan komisaris berarti lebih banyak anggota dengan pengalaman yang memadai yang dapat mewakili kepentingan para pemangku kepentingan. Kesimpulannya dewan komisaris dengan jumlah yang besar berperan dalam meningkatkan tata kelola perusahaan. Akibatnya dewan komisaris, dengan jumlah yang besar tersebut dapat lebih terlibat dalam kegiatan CSR serta dapat mengungkapkan lebih banyak informasi melalui pelaporan CSR dalam suatu perusahaan (Elmagrhi et al., 2016).

Dalam penelitian yang terdahulu menunjukkan bahwa jumlah anggota dewan komisaris berkaitan positif dengan informasi pengungkapan informasi CSR termasuk dalam bagian laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Pakistan untuk berbagai industri (M. Khan et al., 2020). Berbanding terbalik dengan penelitian Halme & Huse pada tahun 1997 dengan topik bahasan hubungan total jumlah anggota dewan komisaris terhadap pengungkapan informasi dalam pelaporan CSR dengan hasil yang tidak signifikan. . Sehingga untuk menguji apakah jumlah dewan komisaris mempengaruhi informasi pelaporan CSR, maka peneliti mengembangkan hipotesis kedua sebagai berikut:

H2: Terdapat hubungan positif antara ukuran dewan komisaris dengan tingkat pengungkapan informasi CSR.

Kepemilikan Asing (FOROWN)

Struktur kepemilikan dalam suatu perusahaan dapat menyebabkan kesenjangan pada legitimasi. Dalam hal ini pengungkapan CSR dalam suatu perusahaan memiliki fungsi sebagai strategi legitimasi yang proaktif untuk tujuan investasi yang berkelanjutan serta memuaskan para investor (Haniffa & Cooke, 2005). Pada dasarnya pemilik asing cenderung lebih sadar serta peka mengenai ketertarikan terhadap kegiatan CSR pada masyarakat yang semakin meningkat. Maka dari itu, Perusahaan dengan kepemilikan modal asing yang lebih besar diminta untuk mengungkapkan informasi CSR dengan lebih baik. Hal tersebut ditujukan untuk membantu pemilik asing untuk mengambil keputusan atas investasi yang mereka tanamkan.

Penelitian oleh (A. Khan et al., 2013b; Muttakin & Subramaniam, 2015) memberikan beberapa dukungan berupa bukti perspektif dalam konteks Asia terkait adanya hubungan positif dari pemegang saham asing dengan pengungkapan informasi CSR. Hal tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan pemegang saham asing dalam perusahaan yang terdaftar di Asia memiliki peran dalam peningkatan pengungkapan sosial dan lingkungan perusahaan. Sehingga untuk membuktikan hal tersebut peneliti mengusulkan hipotesis ketiga yaitu:

H3: Terdapat hubungan positif antara kepemilikan asing dan tingkat pengungkapan informasi CSR.

Kepemilikan Pemerintah

Kepemilikan pemerintah merupakan karakteristik yang penting dari suatu perusahaan yang berskala besar yang terdaftar di Indonesia. Sebagian besar perusahaan BUMN di

Indonesia telah disetarakan dan terdaftar dalam pasar saham atau Bursa Efek Indonesia. Kepemilikan yang dimiliki negara dalam jumlah persentase tertentu dalam suatu perusahaan tergantung pada seberapa penting bisnis mereka. Keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan perusahaan dapat menekan perusahaan lebih banyak mengungkapkan informasi CSR. Status pemegang saham pemerintah diharapkan dapat mengarah pada pengungkapan CSR lebih baik dalam laporan tahunan perusahaan mereka. Hal tersebut terjadi karena pemerintah harus ikut andil dalam mempromosikan transparansi di antara perusahaan publik di Indonesia

Pada penelitian sebelumnya (Gerged, 2021; A. Khan et al., 2013a; Muttakin & Subramaniam, 2015) besar menyatakan kepemilikan pemerintah dan tingkat pengungkapan informasi dalam pelaporan CSR secara statistik signifikan dan menunjukkan hubungan yang Berbanding terbalik dengan hasil penelitian (Dam & Scholtens, 2012) menunjukkan hubungan negatif antara kepemilikan pemerintah dengan tingkat pengungkapan CSR. Karena sebagaimana besar penelitian terdahulu menunjukkan hasil positif dan signifikan maka peneliti mengusulkan hipotesis keempat yaitu

H4: Terdapat hubungan positif antara kepemilikan Pemerintah dan tingkat pengungkapan informasi CSR.

METODE PENELITIAN

Penentuan Sampel

Populasi penelitian terdiri dari perusahaan di Indonesia yang terdaftar dalam indeks KOMPAS 100 pada tahun 2019-2021. Metode pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling* yang didasarkan pada beberapa kriteria tertentu yang terdiri dari:

1. Perusahaan indeks KOMPAS 100 pada periode 2019-2021.
2. Perusahaan yang secara berturut-turut tidak masuk dalam indeks KOMPAS 100 pada periode 2019-2021.
3. Perusahaan yang tidak melaporkan secara lengkap data variabel penelitian pada perusahaan indeks KOMPAS 100 selama periode 2019-2021.

Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan 3 variabel yang terdiri dari variabel dependen, variabel independen dan variabel kontrol. Berikut disajikan tabel yang berisi beberapa variabel beserta pengukurannya:

Tabel 1
Variabel dan Pengukurannya

Variabel	Sumber	Pengukuran
Variabel Dependen Pengungkapan Tanggung Jawab Perusahaan (CSR)	Bloomberg	Nilai pengungkapan ESG berkisar 0 sampai 100
Variabel Independen Independensi Komisaris (BOIND)	Dewan BEI	Jumlah dewan komisaris independen dibagi dengan jumlah total dewan komisaris dalam perusahaan.

Ukuran Dewan BEI	Jumlah anggota dewan komisaris
Komisaris (BOSIZE)	
Kepemilikan Asing BEI	Proporsi pemegang saham asing terhadap total pemegang saham perusahaan
(FOROWN)	
Kepemilikan Pemerintah BEI	<i>Variable dummy</i> dengan nilai 1 jika perusahaan memiliki kepemilikan pemerintah dan 0 jika sebaliknya.
(GOVOWN)	
Variabel Kontrol	
Ukuran Perusahaan BEI	Logaritma natural dari total asset perusahaan.
(LSIZE)	
Profitabilitas (ROA)	Total <i>Return on Assets</i> (ROA) dalam perusahaan.
Usia Perusahaan (AGE)	Jumlah tahun sejak perusahaan berdiri

Sumber: Penulis

Metode Analisis

Model analisis yang digunakan dalam penelitian untuk melihat pengaruh tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan informasi CSR adalah analisis regresi data panel. Adapun untuk mengolah data penelitian, peneliti menggunakan *software stata* dengan persamaan regresi yang dituangkan dalam rumus sebagai berikut

$$CSR = \beta_0 + \beta_1 BOIND + \beta_2 BOSIZE + \beta_3 FOROWN + \beta_4 GOVOWN + \beta_5 LSIZE + \beta_6 ROA + \beta_7 AGE + \varepsilon.$$

Dimana:

- CSR : ESG disclosure score tahun t;
BOIND : Independensi dewan komisaris;
BOSIZE : Ukuran dewan komisaris;
FOROWN : Kepemilikan asing;
GOVOWN : Kepemilikan pemerintah;
LSIZE : Ukuran Perusahaan;
ROA : Profitabilitas;
AGE : Usia Perusahaan;
 ε : Error term

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Sampel Penelitian

Sampel penelitian ditentukan dengan metode *purposive sampling* dengan menerapkan beberapa kriteria untuk menentukan perusahaan yang dijadikan objek penelitian.

Tabel 2
Pemilihan Sampel

No.	Kriteria Sampel	Jumlah
1.	Perusahaan indeks KOMPAS 100 pada periode 2019-2021	300
2.	Perusahaan yang secara berturut-turut tidak masuk dalam indeks KOMPAS 100 pada periode 2019-2021.	(72)
3.	Perusahaan yang tidak melaporkan secara lengkap data variabel penelitian pada perusahaan indeks KOMPAS 100 selama periode 2019-2021	(39)

Total sampel penelitian	189
Total perusahaan	63

Sumber: Penulis

Hasil dan Pembahasan

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif berdasarkan tabel 3 memuat jumlah pengamatan (Obs), nilai minimal (*Min*), nilai maksimal (*Max*), nilai rata-rata (*Mean*), serta standar deviasi (Std,Dev) dari variabel-variabel penelitian.

Tabel 3
Analisis Deskriptif

Variable	Obs	Mean	Std. Dev	Min	Max
csr	189	44.61714	10.73172	19.00	68.54
boind	189	.4495767	.1200303	.17	.83
bosize	189	5.767196	1.964792	2	14
forown	189	.3112698	.2670713	.00	.96
govown	189	.2380952	.427049	0	1
lsize	189	31.47487	1.274165	27.91	35.08
roa	189	.0560317	.0740085	-.19	.36
age	189	44.85714	21.61402	10	126

Sumber: Output Stata 14, 2024

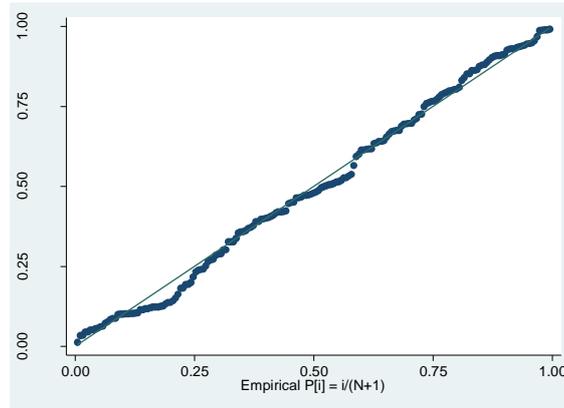
Uji Pemilihan Model Data Panel

Olah data penelitian ini sebelum memasuki tahap uji asumsi klasik peneliti perlu melakukan uji pemilihan data panel dengan 3 pengujian yaitu uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier. Hasil uji Chow untuk membandingkan model terbaik antara model OLS/CEM dengan model FEM dengan hasil Prob = 0,000 artinya model FEM menjadi model terpilih dalam uji Chow. Kemudian uji dilanjut dengan uji Hausman untuk membandingkan model FEM dan Model REM dengan hasil Prob>chi2 = 0,3946 artinya bahwa dalam uji ini REM menjadi model terpilih. Terakhir uji dilanjutkan dengan uji Lagrange Multiplier untuk membandingkan model CEM/OLS dan model REM dengan hasil Prob > chibar2= 0,0000 dengan kesimpulan akhir bahwa model terbaik yang digunakan dalam penelitian ini adalah model *Random Effect Model* (REM)

Uji Normalitas

Uji Normalitas penelitian dengan menggunakan Normal Probability Plot dan di dukung dengan uji statistik non-parametrik *Shapiro-Francia normality test* dengan dasar pengambilan keputusan apabila probabilitas kurang dari 0.05 maka data terdistribusi normal dan sebaliknya

Gambar 1
Uji Normalitas



Variabel	Prob>z	Keterangan
CSR	0,10824	Terdeteksi Normal
BOIND	0,00034	Terdeteksi Tidak Normal
BOSIZE	0,00014	Terdeteksi Tidak Normal
FOROWN	0,00001	Terdeteksi Tidak Normal
GOVOWN	0,00001	Terdeteksi Tidak Normal
LSIZE	0,00839	Terdeteksi Tidak Normal
ROA	0,00001	Terdeteksi Tidak Normal
AGE	0,00001	Terdeteksi Tidak Normal

Sumber: Output Stata 14, 2024

Berdasarkan hasil normal probability plot, titik-titik pada grafik mengikuti pola garis diagonal, menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal. Hasil tersebut didukung dengan hasil uji *Shapiro-Francia normality test* dengan hasil bahwa variabel CSR terdistribusi dengan normal. Adapun variabel lain yang belum terbebas dari uji normalitas digunakan *Central Limit Theorm* dimana kurva distribusi sampling dari sampel yang berukuran 30 atau lebih cenderung akan menunjukkan distribusi normal. Karena sample penelitian berjumlah 189 maka dapat dikatakan telah memenuhi syarat dari teori ini dan secara keseluruhan telah lulus dari uji normalitas.

Uji Multikolinieritas

Dalam mendeteksi adanya gejala masalah multikolinieritas, penelitian ini menggunakan uji matriks korelasi dengan ketentuan bahwa nilai koefisien tidak boleh lebih dari 0,8 serta rata-rata dari nilai VIF dengan ketentuan harus dibawah 10.

Gambar 2
Uji Multikolinieritas

	csr	boind	bosize	forown	govown	lsize	roa	age	VIF
csr	1.0000								
boind	0.0402	1.0000							13.96
bosize	0.1102	-0.0695	1.0000						12.14
forown	0.1784	-0.0532	0.3697	1.0000					11.34
govown	0.0383	0.0172	0.4016	-0.1832	1.0000				5.65
lsize	-0.9422	0.0164	0.0875	-0.1279	0.1238	1.0000			3.37
roa	-0.0386	-0.0673	-0.1342	0.0136	-0.1804	-0.0473	1.0000		1.98
age	0.1558	0.1481	0.1707	0.1215	0.2446	0.0523	0.1066	1.0000	1.70
								Mean	7.16

Sumber: Output Stata 14, 2024

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa hasil uji koefisien matriks korelasi tidak ada yang diatas 0.8 dan rata-rata dari nilai VIF adalah 7,16 sehingga disimpulkan tidak ada masalah multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dimaksudkan untuk memeriksa adanya ketidakseragaman varians dari residual antar observasi dalam model regresi. Untuk mendeteksi heteroskedastisitas, digunakan uji Breusch-Pagan. Indikasi terdapatnya heteroskedastisitas terlihat dari nilai Prob>chi2 kurang dari 0,05.

Tabel 4
Uji Heteroskedastisitas

chi2(1)	=	2.09
Prob > chi2	=	0.1478

Sumber: Output Stata 14, 2024

Berdasarkan tabel 4, hasil uji Breusch Pagan diperoleh nilai 0,1478 yang artinya model penelitian terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi memeriksa terjadinya terdeteksi korelasi dari kesalahan residual antar periode penelitian dengan penelitian sebelumnya dalam model regresi. Metode pengujian dengan uji Wooldridge Test dengan ketentuan nilai harus diatas 0,05 agar terbebas dari masalah autokorelasi.

Tabel 5
Uji Autokorelasi

F(1,62)	=	0,414
Prob > F	=	0,5225

Sumber: Output Stata 14, 2024

Berdasarkan tabel 5, hasil uji Wooldridge Test nilai Prob>F adalah 0,5225, yang artinya lebih dari 0,05. Maka dapat dikatakan model regresi lolos masalah autokorelasi.

Uji Statistik F

Uji statistik F digunakan untuk menentukan pengaruh total variabel independen terhadap variabel dependen dengan signifikan.

$$\text{Prob} > \text{chi2} = 0,000$$

Dari hasil uji ditemukan nilai F adalah 6471,96 dan nilai Prob>chi2 sebesar 0,0000. Maka kesimpulannya, variabel independen secara keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Uji Koefisien Determinan (R^2)

Uji R^2 merupakan uji empiris yang bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh kemampuan model analisis regresi menjelaskan variabel dependen.

Tabel 6
Uji Koefisien Determinasi (R^2)

R-square	0,9604
Adj R-square	0,9597

Sumber: Output Stata 14, 2024

Hasil Uji R^2 dilihat dari nilai Adjusted R-Square bernilai 0,9597. Hasil menunjukkan bahwa variabel independen memiliki kemampuan sebesar 95,97% dalam menjelaskan variasi dalam variabel dependen mengenai pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan dalam sampel penelitian. Sementara itu, 4,03% dari pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan dipengaruhi oleh faktor lain diluar model penelitian.

Uji Parsial (t-test)

Uji statistik t ialah membuktikan seberapa jauh pengaruh masing-masing dari variabel-variabel independen menjelaskan variabel dependen.

Tabel 6
Uji Parsial (t-test)

csr	Coef.	Std. Err.	t	P> t
boind	1.32492	.6597558	2.01	0.045
bosize	.5105498	.0320481	15.93	0.000
forown	-.0698807	.4232438	-0.17	0.869
govown	1.690318	.627868	2.69	0.007
lsize	-1.483216	.0192674	-76.98	0.000
roa	-2.11797	.9877992	-2.14	0.032
age	.0839783	.0119233	7.04	0.000
_cons	83.95752	.8983386	93.46	0.000

Sumber: Output Stata 14, 2024

Berdasarkan hasil uji parsial (*t-test*) maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Independensi Dewan Komisaris

Hipotesis pertama memprediksi terdapat korelasi positif antara independensi dewan komisaris dan tingkat pengungkapan informasi CSR. Hasil uji menunjukkan bahwa nilai koefisien positif 1.32492, dengan nilai probabilitas sebesar 0,045 artinya hipotesis pertama diterima. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Jizi et al., 2014; Shu & Chiang, 2020). Dari hasil penelitian dapat dijelaskan dengan fakta yang menunjukkan bahwa dewan komisaris independen yang lebih mendukung pengungkapan informasi CSR perusahaan sehingga dapat meminimalisir asimetri informasi antara pihak perusahaan dan para stakeholder.

2. Ukuran Dewan Komisaris

Hipotesis kedua memprediksi terdapat korelasi secara positif ukuran dewan komisaris dan tingkat pelaporan CSR. Berdasarkan hasil uji parsial (*t-test*), nilai $P>|t|$ adalah 0,000 dengan nilai koefisien positif sebesar 0,5105498. Hasil menunjukkan bahwa hipotesis diterima dan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (M. Khan et al., 2020) yang melaporkan terdapat hubungan yang positif antara ukuran dewan komisaris dengan tingkat pengungkapan informasi CSR. Berdasarkan pada mekanisme dalam tata kelola perusahaan, semakin besar jumlah ukuran dewan komisaris perusahaan maka berarti lebih banyak juga jumlah anggota dengan pengalaman yang memadai sehingga dapat mewakili kepentingan para stakeholder. Oleh karena itu dengan besarnya jumlah anggota dewan komisaris diharapkan untuk lebih banyak terlibat dalam banyak kegiatan CSR dan mengungkapkan lebih banyak pula pengungkapan informasi CSR perusahaan.

3. Kepemilikan Asing

Hipotesis ketiga memprediksi bahwa kepemilikan asing memiliki pengaruh yang positif terhadap tingkat pengungkapan informasi CSR, secara empiris ditolak. Hasil

penelitian menunjukkan tingkat probabilitas sebesar 0,869 ($>0,05$) yang artinya kepemilikan asing tidak berpengaruh secara signifikan dengan tingkat pengungkapan CSR sejalan dengan penelitian yang dilakukan Amran & Devi, 2008 dan Said et al., 2009. Perbedaan hasil tersebut terjadi karena adanya kemungkinan bahwa perusahaan dengan kepemilikan asing yang lebih tinggi menggunakan media alternatif lain untuk tujuan CSR diantaranya mengungkapkan kegiatan CSR dalam laporan keberlanjutan secara terpisah, mengunggah dalam web perusahaan, serta mengumumkannya dalam rapat triwulanan investor domestik dan asing.

4. Kepemilikan Pemerintah

Hipotesis keempat mengasumsikan adanya korelasi positif antara kepemilikan pemerintah dan tingkat pelaporan informasi CSR. Hasil uji parsial (t-test) dengan koefisien bernilai positif sebesar 1,690318 dan nilai $P > |t|$ sebesar 0,007. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis diterima dan sejalan dengan penelitian (Muttakin & Subramaniam, 2015). Perusahaan milik pemerintah cenderung dituntut untuk mengungkapkan informasi CSR perusahaan mereka. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut lebih sensitif secara politis. Oleh karena itu, terdapat harapan kuat bagi perusahaan-perusahaan tersebut untuk lebih menyadari tanggung jawab sosial mereka.

5. Variabel Kontrol

Peneliti juga menambahkan tiga variabel kontrol, yaitu ukuran perusahaan (LSIZE), profitabilitas (ROA), dan usia perusahaan (AGE). Hasil uji parsial (t-test) variabel LSIZE memiliki koefisien negatif sebesar -1,483216 dengan nilai probabilitas sebesar 0,000 (kurang dari 0,05), sehingga terdapat hubungan signifikan tetapi arahnya negatif terhadap variabel dependen. Variabel ROA memiliki koefisien negatif sebesar -2,11797 dan nilai probabilitas 0,032 (kurang dari 0,05), menunjukkan hubungan yang signifikan tetapi arahnya negatif terhadap variabel dependen. Variabel AGE memiliki koefisien positif senilai 0,0839783 dengan nilai probabilitas 0,0000 (kurang dari 0,05). Dengan demikian, kesimpulannya usia perusahaan (AGE) memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap pelaporan CSR

PENUTUP

Simpulan

Penelitian ini telah meneliti tingkat pelaporan informasi CSR dalam laporan tahunan melalui ESG Disclosure Score yang bersumber dari Bloomberg terhadap perusahaan indeks KOMPAS 100 di Indonesia pada periode 2019-2021 dan hubungannya dengan karakteristik tata kelola perusahaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa independensi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, dan kepemilikan pemerintah berhubungan secara signifikan dengan arah yang positif dengan tingkat pengungkapan informasi CSR. Namun peneliti tidak bisa menemukan hubungan signifikan antara kepemilikan asing dengan tingkat pelaporan informasi CSR.

Keterbatasan

Meskipun penelitian ini meneliti faktor tata kelola perusahaan yang memberikan dampak pada peningkatan pengungkapan informasi CSR dan melengkapi beberapa literatur terdahulu tetapi penelitian ini masih terdapat keterbatasan. Keterbatasan penelitian diantaranya pertama sampel penelitian masih sangat kecil dari total 300 populasi perusahaan dalam list indeks Kompas 100 tahun 2019-2021 hanya 189 sampel perusahaan yang masuk dalam kriteria penelitian. Kedua jangka waktu penelitian masih terbatas 3 tahun penelitian saja yaitu dari tahun 2019-2021. Ketiga, penelitian ini hanya menggunakan satu Teknik regresi yaitu regresi data panel.

Saran

Adapun saran bagi penelitian di masa depan dapat mempertimbangkan untuk menambah tahun penelitian untuk memperbanyak sampel. Kemudian penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan teknik regresi lain dalam mengukur pengungkapan informasi CSR. Terakhir studi lintas negara juga dapat dilakukan untuk lebih memahami dan dapat membandingkan pengaruh peraturan tata kelola perusahaan serta persyaratan pengungkapan dalam menerbitkan informasi CSR di negara-negara berkembang di Asia Tenggara.

REFERENSI

- Alnabsha, A., Abdou, H. A., Ntim, C. G., & Elamer, A. A. (2018). Corporate boards, ownership structures and corporate disclosures: Evidence from a developing country. *Journal of Applied Accounting Research*, 19(1). <https://doi.org/10.1108/JAAR-01-2016-0001>
- Amir, A. Z., & Serafeim, G. (2018). Why and how investors use ESG information: Evidence from a global survey. *Financial Analysts Journal*, 74(3). <https://doi.org/10.2469/faj.v74.n3.2>
- Amran, A., & Devi, S. S. (2008). The impact of government and foreign affiliate influence on corporate social reporting: The case of Malaysia. *Managerial Auditing Journal*, 23(4). <https://doi.org/10.1108/02686900810864327>
- Christensen, H. B., Hail, L., & Leuz, C. (2021). Mandatory CSR and sustainability reporting: economic analysis and literature review. *Review of Accounting Studies*, 26(3). <https://doi.org/10.1007/s11142-021-09609-5>
- Cohen, J. R., Holder-Webb, L., & Zamora, V. L. (2015). Nonfinancial information preferences of professional investors. *Behavioral Research in Accounting*, 27(2). <https://doi.org/10.2308/bria-51185>
- Dam, L., & Scholtens, B. (2012). Does Ownership Type Matter for Corporate Social Responsibility? *Corporate Governance: An International Review*, 20(3). <https://doi.org/10.1111/j.1467-8683.2011.00907.x>
- Elamer, A. A., AlHares, A., Ntim, C. G., & Benyazid, I. (2018). The corporate governance–risk-taking nexus: evidence from insurance companies. *International Journal of Ethics and Systems*, 34(4). <https://doi.org/10.1108/IJOES-07-2018-0103>
- Gerged, A. M. (2021). Factors affecting corporate environmental disclosure in emerging markets: The role of corporate governance structures. *Business Strategy and the Environment*, 30(1). <https://doi.org/10.1002/bse.2642>
- Halme, M., & Huse, M. (1997). The influence of corporate governance, industry and country factors on environmental reporting. *Scandinavian Journal of Management*, 13(2). [https://doi.org/10.1016/S0956-5221\(97\)00002-X](https://doi.org/10.1016/S0956-5221(97)00002-X)
- Jizi, M. I., Salama, A., Dixon, R., & Stratling, R. (2014). Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Disclosure: Evidence from the US Banking Sector. *Journal of Business Ethics*, 125(4). <https://doi.org/10.1007/s10551-013-1929-2>
- Khan, A., Muttakin, M. B., & Siddiqui, J. (2013a). Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Disclosures: Evidence from an Emerging Economy. *Journal of Business Ethics*, 114(2). <https://doi.org/10.1007/s10551-012-1336-0>



- Khan, A., Muttakin, M. B., & Siddiqui, J. (2013b). Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Disclosures: Evidence from an Emerging Economy. *Journal of Business Ethics*, 114(2). <https://doi.org/10.1007/s10551-012-1336-0>
- Khan, M., Lockhart, J., & Bathurst, R. (2020). A multi-level institutional perspective of corporate social responsibility reporting: A mixed-method study. *Journal of Cleaner Production*, 265. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.121739>
- Liu, X., & Zhang, C. (2017). Corporate governance, social responsibility information disclosure, and enterprise value in China. *Journal of Cleaner Production*, 142, 1075–1084. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.09.102>
- Muttakin, M. B., & Subramaniam, N. (2015). Firm ownership and board characteristics: Do they matter for corporate social responsibility disclosure of Indian Companies? *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, 6(2). <https://doi.org/10.1108/SAMPJ-10-2013-0042>
- Nekhili, M., Nagati, H., Chtioui, T., & Rebolledo, C. (2017). Corporate social responsibility disclosure and market value: Family versus nonfamily firms. *Journal of Business Research*, 77, 41–52. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2017.04.001>
- R Yap & Widyaningdyah, A. U. (2009). Pengungkapan Pertanggungjawaban Sosial Pada Laporan Tahunan Perusahaan Yang Go Public di Bursa Efek Indonesia (Studi Empiris atas Perusahaan High dan Low-Profile). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Airlangga*, 94–105.
- Rodriguez-Fernandez, M. (2016). Social responsibility and financial performance: The role of good corporate governance. *BRQ Business Research Quarterly*, 19(2), 137–151. <https://doi.org/10.1016/j.brq.2015.08.001>
- Said, R., Zainuddin, Y., & Haron, H. (2009). The relationship between corporate social responsibility disclosure and corporate governance characteristics in Malaysian public listed companies. *Social Responsibility Journal*, 5(2). <https://doi.org/10.1108/17471110910964496>
- Shu, P. G., & Chiang, S. J. (2020). The impact of corporate governance on corporate social performance: Cases from listed firms in Taiwan. *Pacific Basin Finance Journal*, 61. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2020.101332>